

# *Civic of Culture: Media, Kaum Muda, dan Mengenal Ke-Istimewaan Yogyakarta*

## **ABSTRACK**

*Ideally local media has special spaces to present special characters of culture in a particular area. The objectives are to improve the pride and sense of belonging as well as cohesive correlation of the society especially the young generation. The study is aimed to investigate an analysis "How is the role of local media in Yogyakarta, both local TV Jogja TV and mass media Kedaulatan Rakyat in presenting special characters of Yogyakarta culture in shaping Civic culture?" so young generation are able to admit those characters. The object research of local media will be chosen qualitatively during July-August 2014 by looking at the kinds of local culture presented in the medias and analyzing the roles of local media. Choosing both medias was based on the biggest and the most influential local medias in Yogyakarta. The study uses qualitative analysis to investigate local wisdom in the medias, and then the researcher would have focus groups discussion (FGD) to young generations who were born, grown, and living in Yogyakarta at least 20 years. The result of the research is going to give an image of thinking*

*pattern as well as sense of belonging from young generation to see special characters of Yogyakarta..*

*Keywords: local media; social culture; young generation*

## **ABSTRAK**

Idealnya media lokal memberi ruang untuk menampilkan ke-Istimewaan budaya sebuah daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kebanggaan, rasa memiliki serta kohesivitas masyarakat khususnya kaum muda. Penelitian ini akan melakukan analisis "Bagaimana peran media lokal Yogyakarta, baik TV lokal yaitu *Jogja TV* dan media cetak koran yaitu *Kedaulatan Rakyat* dalam menampilkan kekhasan-keunikan kebudayaan Yogyakarta dalam membentuk *Civic Culture*" sehingga kaum muda mengakuinya. Obyek riset media lokal akan dipilih secara kualitatif dalam rentang waktu Juli-Agustus 2014 dengan melihat muatan kebudayaan lokal apa saja yang ditampilkan dalam media-media tersebut dan peran-peran apa saja yang sudah dilakukan oleh media lokal. Pemilihan kedua media di atas didasarkan pada media lokal yang paling besar dan berpengaruh di masyarakat Yogyakarta. Kajian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk melihat beberapa tayangan dan artikel muatan lokal dalam media, kemudian peneliti akan melakukan diskusi kelompok terfokus (FGD) kepada kalangan kaum muda yang lahir, besar dan tinggal di Yogyakarta minimal selama 20 tahun. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran pola pikir sekaligus pengakuan anak muda melihat ke-Istimewaan Yogyakarta.

Kata kunci: Media Lokal; Budaya Warga; Kaum Muda; Keistimewaan Yogyakarta

## **PENDAHULUAN**

Media-media nasional di Indonesia memiliki kemampuan modal yang kuat. Selain itu memiliki infrastruktur teknis yang canggih, sumber daya manusia yang beragam dan dekat dengan kekuatan pemerintah pusat. Hal ini membuat media elektronik maupun cetak mudah diintervensi berbagai kepentingan politik. Kenyataan demikian membuat sulit membendung arus tayangan nasional yang lebih menekankan rating kuantitatif yang berdasar pada banyaknya penonton.

Berorientasi pada tingginya pemasukan iklan dan bukan pada kualitas atau mutu isi siaran yang menjadi target utama. Hasilnya ketika musim Pemilu (Pemilihan Umum Lima Tahun) tiba, tayangan-tayangan yang lebih sering mondar-mandir menjejali “ruang udara” sekadar berkuat pada tayangan iklan politik para pemilik media, berita-berita politik yang memiliki akurasi rendah atau tayangan “*reality show*” yang mengusung kiprah sang capres dan cawapres. Seperti yang terjadi pada pemilu presiden Juni-Juli 2014 lalu, masing-masing stasiun televisi swasta memperlihatkan tayangan berita berdasarkan afiliasi politik dan kendali pasar semata dengan tidak mengindahkan etika jurnalistik (*market driven journalism*) (Pemilu presiden diwarnai keberpihakan media nasional terhadap dua kandidat Capres dikarenakan media yang juga milik petinggi partai politik. Joko Widodo yang didukung Surya Paloh pemilik ‘Metro TV’ dan Media Indonesia Group. Sedangkan Prabowo disokong oleh Koalisi Merah Putih yang salah satu partai pengusungnya adalah Partai Golkar (Golongan Karya) yang dipimpin ketua umum Aburizal Bakrie sebagai pemilik ‘TV One’ dan ‘Viva Group’).

Dilain hal media turut berperan dalam mewarnai *civic culture* dalam masyarakat sebuah bangsa. Media televisi turut membentuk mental dan cara berpikir, karena media adalah salah satu referensi untuk mendapatkan informasi, pendidikan dan hiburan. Seperti yang disampaikan oleh Laswell (dalam Darwanto, 2007: 32-33), media massa dapat berfungsi sebagai “*The transmission of the social heritage from one generation to the next*”, artinya media massa sebagai sarana untuk menyampaikan nilai dan warisan sosial budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Umumnya secara sederhana fungsi media ini dimaksudkan sebagai fungsi pendidikan (*educational function of mass media*). Kondisi media di Indonesia saat ini syarat dengan perilaku politik yang tidak beretika sehingga turut menyumbang keengganan kaum muda untuk berpolitik. Padahal kaum muda

semestinya diperkenalkan dengan politik, karena merekalah penerus dan pelaku kebijakan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Perilaku politik tidak beretika dan dipenuhi oleh kepentingan penguasa justru lebih dominan menghiasi ruang media massa yang dipertontonkan setiap hari.

Televisi merupakan bagian dari mesin kebudayaan yang memproduksi dan mereproduksi tayangan-tayangan yang penuh dengan kepentingan *status quo*. Akibatnya, budaya televisi dapat berbeda dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi di masyarakat. Televisi akhirnya hanya memberikan ruang bagi kelompok dominan dalam menyebarkan gagasan sesuai kepentingan penguasa (Fiske, 1991). Dalam konteks ini televisi-televisi swasta di Indonesia dikuasai oleh para pemilik modal yang juga menjadi bagian partai politik. Oleh karena itu kepentingan sekelompok golongan dan elit politik kemudian lebih mendominasi dalam tayangan-tayangan media televisi nasional.

Ditengah kepenatan melihat praktik media berskala nasional tersebut, maka di sinilah keberadaan media lokal diharapkan memiliki peran yang signifikan dalam memberi ruang pada kebudayaan setempat. Keunggulan dan keunikan budaya lokal akan dapat terartikulasikan dengan baik apabila yang “menyuarakan” budaya tersebut adalah asli dari masyarakat, kelompok maupun komunitas lokal. Berdasarkan pemikiran di atas sesungguhnya pemerintah pusat RI sudah mengatur dalam *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta* dan tercantum pula mengenai penyiaran pengaturan lokal. Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 No. 4 telah disebutkan: “Stasiun Penyiaran Lokal adalah stasiun yang didirikan di lokasi tertentu dengan wilayah jangkauan terbatas dan memiliki studio dan pemancar sendiri”. Selanjutnya juga diatur dalam Bab II Penyelenggaraan Penyiaran Bagian Pertama Programa/Saluran Siaran, Pengaturan Jumlah,

dan Cakupan Wilayah Siaran dalam Bagian Keempat Bahasa Siaran Pasal 16 point 2 bahwa "Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu".

Sejalan dengan peraturan tersebut di berbagai daerah di Indonesia berdirilah media-media yang bermuatan penyiaran lokal, berciri khas kebudayaan setempat. Tujuan pengaturan tersebut tidak lain adalah pemerintah sebagai pengawas sekaligus regulator siaran harus dapat menjamin terakomodasinya siaran-siaran berbasis kearifan lokal untuk tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Respon negara pada awalnya terjadi karena desakan berbagai pihak baik masyarakat, akademisi dan pemerhati kebudayaan lokal yang prihatin dengan tayangan-tayangan nasional yang semakin tersentralisasi kebudayaannya menjadi sangat *Jakartaisme* (Tayangan yang berbasis pada kebudayaan ibukota Jakarta dianggap lebih modern dan kekinian, erat dengan kehidupan kota besar yang metropolis sehingga dianggap lebih memberi ruang pada kehidupan perkotaan yang hedonis dan glamor). Kemudian hal inilah yang memicu lahirnya berbagai stasiun TV lokal misalnya: *JTV (Jatim TV)*, *Bali TV*, *Jogja TV*, *Lombok TV*, *Malang TV* dan *AD TV*.

Jalan keluar realitas media ini kemudian direspon dengan diaturnya penyelenggaraan media lokal dengan pengelolaan berbasis pada kemampuan daerah, dengan ini diharapkan media lebih memahami keadaan riil masyarakat setempat. Kehadiran media lokal di daerah akan lebih "berpihak" pada kepentingan masyarakat untuk menyuarakan informasi yang "netral" dan apa adanya dapat tercapai. Meskipun tidak dapat dipungkiri media lokal masih memiliki beberapa hambatan: seperti modal yang terbatas, wilayah jangkauan siaran lemah dan sumberdaya manusia yang rendah. Bahkan dapat juga frekuensi maupun program TV lokal seringkali masih berelasi dengan pemodal

nasional, sebut saja kanal *RBTV (Retjo Buntung Televisi)* media lokal di Yogyakarta yang jam siarannya didominasi oleh siaran TV nasional yaitu *Kompas TV*.

Keadaan yang relatif sama dapat kita lihat dalam aktivitas media lokal surat kabar. Masuknya berbagai surat kabar lokal yang berjangkauan nasional juga cukup "mengguncang" pasar daerah. Di Yogyakarta sebagai contoh, di pertengahan 2000-an perusahaan grup media *Jawa Pos* yang menjadi "pemain" kuat di Jawa Timur dan nasional memunculkan koran *Radar Jogja*. Kemudian koran *Tribun* juga sempat membuat pasar distribusi surat kabar Yogyakarta bergeser, saat koran afiliasi *Kompas Gramedia Group* ini dijual dengan harga Rp. 1.000,-/eksemplar. Namun demikian koran legendaris Yogyakarta yaitu *Kedaulatan Rakyat* ternyata masih menjadi *market leader* sampai saat ini. Bahkan menurut pengamatan peneliti pada sepanjang bulan Juni-September 2014 surat kabar ini masih dibaca dan ditempel di "Papan Baca" berbagai pelosok desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Jogja TV* hadir di DIY pada tahun 2004. Dimiliki oleh pengusaha asal Bali, stasiun televisi ini mengklaim telah mampu menghadirkan beberapa tayangan yang *genuine* atau asli kebudayaan Yogya, maupun menampilkan tayangan yang berkaitan dengan kebudayaan sekitarnya. Seperti yang tercantum dalam Visi Misi stasiun televisi ini (<http://www.jogjatv.tv/about-us#sthash.OGnjXQX.dpuf>):

"PT. Yogyakarta Tugu Televisi juga merupakan TV yang memiliki tiga pilar utama yaitu pendidikan, budaya, dan pariwisata sehingga diharapkan mampu memberikan informasi, hiburan, dan kontrol sosial terhadap masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Visi dan Misi Jogja TV diantaranya adalah menjadi etalase kearifan lokal budaya Nusantara dan menjadi televisi yang mengaplikasikan teknologi tanpa mengesampingkan tradisi adiluhung, sehingga dapat mendorong peningkatan sektor pendidikan, perekonomian serta pariwisata Yogyakarta dan sekitarnya."

Beberapa tayangan unggulan *Yogya TV* antara lain *Seputar Jogja Pagi*, *Pawartos Enjing*, *Langen Swara Tradisional*, *Klitikan*, *Jogja Music Nation*, *Kawruh*, *Seputar Jogja*, *Pawartos Ngayogyakarta*, *Seni dan Budaya*, *Koplakan (tradisional)*, *Suluh Indonesia*, *Seputar Jogja Malam*, *Wayang Wong* dan *Wayang (tradisional)*. Berbasis pada informasi lokal berbahasa Jawa televisi *Jogja TV* mampu bertahan di tengah gempuran dan banjir informasi dari media-media nasional yang selalu menayangkan “kebaruan” dan “budaya populer<sup>2</sup>” (Tayangan yang sedang populer berbasis pada massifikasi, komodifikasi dan standardisasi).

Sedangkan *Kedaulatan Rakyat* adalah koran tertua di Yogyakarta berdiri sejak 27 September 1945 dan sampai saat ini memimpin penjualan koran di kota ini. Pendiri koran *Kedaulatan Rakyat* atau sering disebut KR adalah HM. Samawi dan H. Soemadi Martono Wonohito. Sejak didirikan lebih dai 69 tahun yang lalu media cetak ini erat dengan proses kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang tertulis dalam website [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com):

“KR merupakan koran ke dua setelah koran dengan Bahasa Jawa yang bernama “*Sedyata Tama*” yang terbit dua minggu sekali. Saat koran *Sedyata Tama* dibredel oleh tentara Jepang, kemudian tentara Jepang mendirikan percetakan dan menerbitkan koran *Sinar Matahari*. Didorong keinginan menerbitkan koran sendiri oleh pemerintah Indonesia, maka koran *Sinar Matahari* yang berkaryawan orang Indonesia. Atas gagasan HM. Samawi dan H. Madikin Wonohito, maka berdirilah percetakan dan harian *Kedaulatan Rakyat* ini. Nama harian “*Kedaulatan Rakyat*” diambil dari UUD 1945 alinea keempat. Di bawah naungan PT. BP. *Kedaulatan Rakyat Group*, *Kedaulatan Rakyat* memiliki berbagai media, di antaranya media cetak dan media daring sebagai sarana informasi berita. *Kedaulatan Rakyat* memiliki berbagai konten berita yang terdiri dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Nasional, Internasional, Ekbis, Pendidikan, Sport, Lifestyle, Wisata. Teknologi dan Konten Konsultasi Penanganan”.

Rubrik kebudayaan andalan KR sesuai penelusuran peneliti di bulan Juli-Agustus 2014 antara lain: Cerita Bersambung: *Api di Bukit Menoreh*, Artikel Berbahasa Banyumas: *Wulan Juli 2014*, Artikel Rubrik Panggung: *Wayangan di Halaman KR Serial Baratayuda “Abimanyu Gugur”*, “*Santi Mangayu-ayu*” karya *Tari Rama Sas*, Pameran Seni Kriya Damas Sangaji: *Korelasi Sakit Tubuh dan Sakit Hati*, Ramadhan dalam Puisi: *Penyair Purwokerto Tampil di SBM*, Jadwal Acara Kesenian: *Tontonan di Yogya Hari Ini*, Berita Foto: *Karawitan*, Shot: *Ramadhan Masjid Mataram* Artikel Rubrik Budaya: *Sesaji Nagaraja*, *Catatan Budaya: Nama Jalan Memanjangkan Ingatan*, Artikel Mekar Sari (Memeti Kebudayaan Jawi): *Cerkak: Pak Guru Sumbi*, *Macapatan: Lumebet Wulan Ramadhan*, *Geguritan: Dudu Bharata Yuda & Pangilon*, *Kawruh Tembung: Tumbak Cucutan*, *Petung Jawa lan Lakon: Nrima Ing Titah*, *Pedhalangan: Sirmane Kangsadewa*, *Adihuhung: Menang Tanpa Ngasorake*, *Digdaya Tanpa Aji*. Karikatur Khas KR: *Mas Karyo: Tunggu Hasil KPU*.

Namun siapa sebenarnya penonton dan pembaca media lokal ini? Apakah media lokal telah menyentuh pembaca kalangan muda? Apakah tayangan kebudayaan lokal tersebut diminati dan betul-betul telah menjadi “ruang” berbeda bagi kaum muda Yogyakarta yang sudah terlanjur dibanjiri arus informasi dari Jakarta? Pertanyaan selanjutnya apakah betul media lokal kemudian masih diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif penggerak untuk perubahan bangsa? Media lokal untuk menumbuhkan rasa memiliki kebudayaan daerah seperti amanat UU Penyiaran tahun 2005?

Inilah yang akan peneliti amati apakah media lokal melalui tayangan medianya telah meningkatkan kebanggaan, rasa memiliki serta kohesivitas masyarakat khususnya kaum muda atau sebaliknya. Seperti yang peneliti sebutkan di atas, media lokal yang paling besar di kota ini adalah *Jogja TV* untuk media elektronik dan *Kedaulatan Rakyat* untuk media cetak. Apakah kedua media lokal tersebut sudah

menampilkan keunikan kebudayaan lokal dan sudah berperan dalam pembentukan karakter budaya “wong” Jogja khususnya kaum muda. Berkaitan dengan realitas di atas maka peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut: 1. Bagaimana peran media lokal Yogyakarta, baik TV lokal yaitu *Jogja TV* dan media cetak koran yaitu *Kedaulatan Rakyat* dalam menampilkan kekhasan-keunikan kebudayaan Yogyakarta dalam membentuk *Civic Culture*? 2. Bagaimana pemahaman kaum muda mengenai *Civic Culture*?

## METODE PENELITIAN

### 1. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis isi media secara deskriptif. Metode penelitian secara deskriptif dalam metodologi selalu dikaitkan dengan tujuan penelitian (Nasution dalam Soerjono, 1990: 19-22). Masih dalam sumber yang sama menurut Mely G. Tan penelitian deskriptif dilakukan apabila peneliti ingin menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana tayangan media lokal menampilkan kebudayaan Yogyakarta.

### 2. LOKASI DAN INFORMAN PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Yogyakarta kepada kalangan kaum muda yang lahir, besar dan tinggal di Yogyakarta minimal selama 20 tahun yang masih berumur di bawah 35 tahun. Selain usia, peneliti memilih informan berdasarkan aktivitas sehari-hari mereka yang dekat dengan aktivitas kebudayaan seperti menari, teater, seni jatilan dan seni gamelan. Selain itu mereka juga terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, aktif di lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, pekerja kreatif maupun pengusaha. Latar belakang tersebut juga menjadi pertimbangan peneliti, sebagai bagian dari variasi dalam memperoleh informasi. Para informan tersebut adalah: Rustam (33) seorang pengusaha di

bidang *tour&travel*, pengusaha muda di bidang pembangunan rumah, dan aktif di bidang seni Jatilan di kampungnya di daerah Sleman. Udin (34) mantan pekerja media lokal yang saat ini sibuk menulis skenario untuk film dokumenter (sejarah, purbakala, gamelan), aktif dalam kegiatan seni gamelan. Iwan (31) aktivis LSM, aktif dalam penanganan konflik di DIY dan pegiat teater. Bona (28) *freelancer*, pekerja kreatif (film dan *event organizer*), mahasiswa dan memiliki keluarga berlatar belakang seni lukis. Imah (29) mahasiswa S2, aktivis perempuan dan antariman, juga aktivis LSM. Berikutnya yaitu Wawan (21) mahasiswa salah satu kampus swasta di Jogja, sedari kecil aktif sebagai penari modern dan tradisional.

### 3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dengan merekam langsung tayangan-tayangan *Jogja TV* pada bulan Juli-Agustus 2014. Peneliti juga akan melakukan scan pada berita-berita serta artikel di koran *Kedaulatan Rakyat* pada periode yang sama.

Hasil tersebut kemudian menjadi acuan pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan melalui diskusi kelompok terfokus (*fgd*). Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi untuk memperdalam dan mempertajam hasil temuan yang ada.

### 4. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan model analisis interaktif, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga komponen, yaitu (1) Reduksi Data (*reduction*), (2) Sajian Data (*display*) dan (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing*) (Miles dan Huberman, 1992, 16-21). Reduksi data yang dimaksud adalah hasil diskusi kelompok terfokus dan observasi yang telah diperoleh kemudian diidentifikasi data. Setelah dilakukan identifikasi data dideskripsikan dalam sajian data yang diperkuat dengan analisis untuk membuat kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### CIVIC CULTURE DAN NEGARA

Membahas *Civic Culture* atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan budaya kewargaan adalah rasa, sikap dan perilaku yang mengarah pada keterikatan menjadi kesatuan komunitas atau masyarakat yang menjunjung nilai-nilai kebersamaan, moral, etika sehingga tumbuh kesadaran untuk bersama-sama membangun peradaban. Berkaitan dengan itu partisipasi politik aktif dari rakyat harus dilakukan yang tentu berelasi dengan ruang publik. Meskipun pada realitasnya dalam politik ruang publik justru yang paling kuat adalah pemilik modal dan segelintir elit politik yang lebih menguasai wacana mengenai kebudayaan dan politik praktis (Habermas dalam Durham & Kellner, 2006: 73-78). Karenanya *civic culture* bagian dari kultur politik. Partisipasi politik yang aktif harus didukung dengan situasi yang aman, nyaman, dimana setiap warga masyarakat memahami posisi dan fungsi dirinya dalam sebuah masyarakat bahkan negara. Persoalan *civic culture* juga dekat dengan konsep *civil society*, seperti yang disampaikan oleh Hikam (1996: 3) bahwa:

“Civil Society dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sebagai ruang politik, civil society adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (the free public sphere), tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat”.

Dalam konteks demokrasi budaya

kewargaan menempatkan persoalan sosial, politik dan budaya adalah isu bersama. Bersama untuk dibicarakan, didiskusikan dan diberi jalan keluar. Almond dan Verba menjelaskan (1980) *civic culture* adalah proses kombinasi sikap dan tingkah laku masyarakat yang mendukung kestabilan politik. *Civic culture* mencakup sikap dan reaksi masyarakat terhadap politik dan pemerintah secara luas. Lebih lanjut Almond dan Verba menjabarkan ada tiga perilaku politik dalam masyarakat. Pertama, *Participants* adalah kelompok yang terlibat aktif dalam proses politik. Kelompok ini bisa berupa partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi agama, kelompok inisiatif independen atau sekumpulan relawan dalam pilihan calon presiden. Kedua, *Subjects* mereka adalah bagian masyarakat yang mau mengikuti aturan-aturan pemerintah namun lebih memilih untuk menjaga jarak dengan persoalan politik. Kelompok ini dapat berupa pengusaha-pengusaha yang enggan terjun dalam dunia politik atau dapat juga pemuka agama yang tidak ingin berurusan dengan politisi dan pejabat namun mematuhi semua aturan-aturan negara. Ketiga, ialah *Parochial* sekelompok masyarakat yang sama sekali tidak peduli dengan politik dan kinerja pemerintahannya, di Indonesia proses keenganan berpartisipasi dalam pemilu disebut Golput atau Golongan Putih (Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Arief Budiman aktivis politik tahun 1966 yang memprotes diadakannya pemilu karena seakan melakukan proses demokrasi namun sesungguhnya pemenang politik sudah ditentukan yaitu partai Golkar (Golongan Karya) yang menjadi penyokong kekuasaan *status quo* Orde Baru saat itu).

Dalam prinsip demokrasi pentingnya “suara” rakyat didengar dalam posisi yang setara satu sama lain. Kemudian posisi masyarakat harus sama kuatnya dengan posisi negara yang berperan menjadi pemerintah dan penguasa. Sehingga Gellner (dalam Chamim, ed, 2003: 49) menyatakan konsep *civil society* sebagai masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non pemerintah yang otonom dan

cukup kuat untuk mengimbangi negara. Tujuannya adalah membendung dominasi yang sangat mungkin dilakukan negara. Begitu pula menyoal *civic culture* adalah keterkaitan antara pengelolaan kemajemukan dalam masyarakat dalam ruang aktivitas masyarakat itu sendiri. Sehingga muncul istilah *social capital*:

*“Public associations and interactions may indeed generate a “social capital” for civic peace and democratic development. However, if they are to do so, they must do more than display the familiar structural characteristics of “self-organization” and independence from the state. To play a democracy-enhancing role, the discourse and practice of people in public associations must be politically and culturally civil” (Hefner, 2001:10)*

Lanjut Hefner hal ini dikarenakan dalam *civil society* hampir tidak pernah memiliki situasi yang homogen. Namun sebaliknya heterogen dengan berbagai kompleksitas persoalan. Karena masyarakat dibangun berkaitan dengan perbedaan-perbedaan etnis, bahasa, agama, gender dan ideologi yang bekerja sebagai keseluruhan. Padahal negara yang seharusnya netral dan akomodatif selalu memiliki kecenderungan lebih melindungi kelompok mayoritas. Oleh karena itu *social capital* diharapkan dibentuk oleh asosiasi masyarakat (*civic associations*) yang otonom untuk memperkuat demokrasi, kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat.

## MEDIA DAN KEBUDAYAAN

Meneliti isi media adalah salah satu cara memahami kebudayaan yang sedang berlangsung pada sebuah masa. Media menampilkan kebudayaan yang sedang populer, kebudayaan yang berdasarkan *status quo* bahkan budaya yang sengaja dibuat oleh institusi media sebagai bagian dari “mesin kebudayaan”. Begitu pula apabila kita akan melihat media lokal dalam menampilkan kebudayaan daerah setempat. Bagaimana cara media lokal menampilkan kebudayaan? Bagaimana ekspresi kebudayaan yang

ditampilkan melalui seleksi-seleksi yang dilakukan oleh pekerja media lokal? Apakah isi media-media lokal tersebut sudah menjadi bagian dari perilaku dan gagasan penontonnya? Lebih lanjut apakah isi media lokal sudah berkaitan dengan konteks pengalaman sosial pemirsanya? Mengutip (Burton, 2000: 63):

*“Televisi adalah bentuk budaya, sebuah ekspresi budaya dan sebuah medium di mana budaya termediasi oleh khalayaknya. Dengan demikian televisi memerantai dan membangkitkan pengalaman budaya. Sehingga budaya menemukan maknanya pada titik dimana khalayak berinteraksi dengan layar kaca, dalam konteks pengalaman sosial dan hubungan-hubungan yang berlangsung di luar layar”*

Di sinilah harus dipahami bagaimana konten media lokal seharusnya ikut memberikan “ruang” bagi penontonnya untuk berpartisipasi dalam mengembangkan nalar *civic of culture*. Media lokal yang dapat menjadi wadah “perbincangan” warga atas kebijakan pemerintah daerah yang tidak pro-rakyat, lalu lintas kota yang macet, jalan kampung yang rusak atau sekadar sosialisasi saat musim kampanye calon legislatif diharapkan dapat ditemui oleh warga masyarakat di daerah.

Frekuensi adalah benda publik oleh karenanya penggunaan frekuensi didasarkan pada ruang jumlah getaran dan lebar pita yang hanya dapat digunakan satu pihak (Rianto dkk, 2012: 95). Oleh karena itu publik seharusnya dilibatkan dalam dalam penentuan isi siaran atau setidaknya harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Artikulasi publik harus sangat dipertimbangkan dalam proses penyiaran (*public choice*). Selain itu mengapa penting memperbincangkan media, karena media adalah bagian penting dalam kehidupan manusia, sebagai penggerak kebudayaan yang sedang dibicarakan dan dilakukan (*popular culture*).

Media juga dapat ditinjau dari paparan sosiologis adalah bagian dari alat sosialisasi: *“Because media are such integral part of our*

*lives, they generate a great deal of popular interest and debat. Through socialization process, we also learn to perform our social roles as friend, student, worker, citizen, and so forth. The process of socialization continues throughout life, but it is especially influential for children and adolescents. If socialization proceeds smoothly, we hardly notice it. The dominant values, believe, and norms of our society become "our" values and norms"* (Croteau dan Hoynes, 2000:13-14).

Media menjadi bagian proses sosialisasi budaya dominan berupa nilai-nilai, keyakinan, norma, agama dan ideologi. Keterkaitan antara media dengan masyarakat juga tercipta dimana media mengantarkan pesan kepada para pembaca/penonton (*readers*). Di sinilah posisi pembaca berinteraksi dengan tayangan-tayangan media dan teknologi yang dimiliki oleh media. Penonton bukanlah entitas yang pasif oleh karena disebut pembaca/*readers* (tidak semata penonton/*audience*).

Di Yogyakarta apakah media lokal telah menjadi jembatan buntunya ruang media nasional yang sudah padat dan sesak dengan kepentingan pengusaha dan elite politik negara? Ataukah justru telah terjadinya jurang yang lebar antara *content* media nasional dengan *content* media lokal sehingga persaingan media sangatlah timpang. Belum lagi persoalan bertambah dengan pemaknaan kebudayaan yang dimiliki media lokal dengan pemaknaan kebudayaan yang dipahami/diinginkan kaum muda ternyata dapat juga berbeda. Sementara itu menurut Geertz (1973), kebudayaan merupakan "nilai yang dimiliki bersama", sebuah tata aturan yang membedakan status dan peran seseorang yang didasarkan pada kategori sosial, gender, kelas, generasi, agama dan juga lainnya. Nilai-nilai tersebut mengikat, menjadi sebuah sistem kontrol yang sekaligus terdistribusikan secara merata kepada masyarakat.

Mengacu pada pemaknaan kebudayaan tersebut, maka kaum muda merupakan generasi yang turut ambil bagian dalam

penciptaan pembentukan makna budaya dan apakah kepentingan kaum muda juga bisa terwakili dengan konsep kebudayaan yang telah dirajut oleh banyak pihak, termasuk oleh media. Ketika kaum muda tidak terlibat atau dilibatkan dalam proses pembentukan makna kebudayaan tersebut, maka ia akan menjadi kelompok yang tersubordinasikan dari hegemoni elit yang telah menjadi pelayan dari kepentingan-kepentingan ekonomi, politik, maupun oleh generasi yang lebih tua.

## KAUM MUDA DAN TRANSFORMASI SOSIO-KULTURAL

Kaum muda adalah motor penggerak perubahan. Seperti yang dikatakan Soekarno "Berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia". Kaum muda yang progresif idealnya selalu menekankan pada partisipasi aktif dalam kegiatan politik. Kesadaran dalam berpartisipasi politik dapat berbentuk kegiatan kemanusiaan, kesukarelaan atau pembentukan komunitas yang berbasis pada minat. Peran kaum muda sangat menentukan kelangsungan sebuah bangsa dan negara. "Kaum muda dinilai sebagai agen penting dalam proses peradaban, khususnya karena melalui kaum mudalah unsur-unsur baru dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam suatu masyarakat. Istilah "berjiwa muda", misalnya telah digunakan untuk menunjuk kepada sikap progresif dan praktik-praktik baru" (Abdullah, 2006: 180).

Anak muda harus diperkenalkan dengan politik, karena merekalah penerus dan pelaku kebijakan bangsa dan negara di masa depan. Politik yang santun dan memihak kepentingan orang banyak harus mulai diperkenalkan kepada remaja melalui pengaktifan gerakan organisasi remaja seperti Pramuka, PMR (Palang Merah Remaja), KIR (Karya Ilmiah Remaja), OSIS atau Karang Taruna, dapat juga dalam lembaga-lembaga di luar sekolah seperti komunitas perpustakaan atau keagamaan. Media juga memiliki peranan dalam membentuk mental dan pengetahuan bagi kaum muda. Apakah media sebagai pemberi



GAMBAR 1 DAN 2

*Seputar Jogja*, Selasa, 22 Juli 2014 dan *Wayang Wong*, Minggu, 20 Juli 2014

informasi, hiburan dan edukasi telah melakukan perannya yang optimal. Seperti yang dijelaskan oleh Ewen (1976) “Media massa merupakan kekuatan yang paling berpengaruh dalam pembentukan pengetahuan dalam dunia pascaindustri”.

Inilah yang menegaskan muatan media memiliki interrelasi dengan kebudayaan *civic culture* sebuah bangsa. Meskipun juga harus dipahami bahwa gaya hidup kaum muda memperlihatkan berlakunya nilai-nilai yang variatif dan bersifat kontestatif. Variasi kelompok kaum muda itu sendiri perlu dilihat berdasarkan berbagai parameter (gender, kelas, desa-kota, agama dan lain-lain) sehingga pendefinisian kebudayaan sebagai sesuatu yang dibagi bersama harus dipikirkan kembali keabsahannya” (Abdullah (2006: 184). Ruang-ruang kota yang aktif dan dinamis misalnya memberikan sumbangsinya pada pola pikir kaum muda yang dapat berbeda dengan dengan kaum tua dalam memaknai kebudayaan.

Keistimewaan Yogyakarta misalnya menekankan pada ruang lingkup berbudaya yang juga akan berbeda direspon oleh kaum muda. Mengapa demikian karena meminjam Sujito (2011:40) bahwa pada hakekatnya “Politik kaum muda tidak bisa absen dari balutan *interest* yang melibatkan berbagai kelompok, atau sekurang-kurangnya beririsan,

demikian mencapai tujuan tertentu. Improvisasi kaum muda ditengah konfigurasi politik yang sering berubah-ubah mengadaptasikan sejumlah arena baru yang tidak bisa terhindarkan dan memunculkan lompatan-lompatan progresif. Inilah yang membuat kaum muda sudah terlanjur dilekatkan dengan “tugas mulia” sebagai agen perubahan sosio-kultural. Politik kaum muda selalu menekankan pada kebaruan dan ruang yang bebas, konsekuensinya benturan-benturan dengan nilai-nilai sosiologis yang sebelumnya hadir dilihat oleh kaum muda sebagai hambatan.

### MEDIA LOKAL DALAM MEMBENTUK CIVIC CULTURE

*Jogja TV* memiliki acara unggulan berupa berita, antara lain *Seputar Jogja Pagi*, *Pawartos Enjing* dan *Seputar Jogja*. Dalam acara tersebut *Jogja TV* menayangkan berbagai rangkuman peristiwa lokal setiap harinya. Menariknya, dalam acara berita *Pawartos Enjing*, berita disajikan dengan menggunakan bahasa Jawa *kromo inggil* khas kebudayaan Yogyakarta. Pembawa berita juga selalu menggunakan pakaian khas beskap dan blangkon bagi laki-laki, berkebaya dan bersanggul bagi perempuan. Di sinilah kebudayaan bahasa Jawa diperlihatkan menjadi bagian sehari-hari yang lekat dengan sopan santun dan tata

krama. Begitu pula dalam tayangan acara *Wayang Wong* yang berisi kisah-kisah kepahlawanan terlihat ditampilkan kebudayaan Jawa yang lekat dengan nilai-nilai keberanian. Seperti terlihat dalam tayangan Minggu, 20 Juli 2014.

Kebudayaan Jawa yang merakyat juga dapat kita lihat dalam tayangan *Langen Swara* Senin, 21 Juli 2014 berisi lagu-lagu campur sari. Tayangan ini dikemas dengan pembawa acara yang ramah dan ceria menyapa para pemirsa. Pemirsa juga dapat secara interaktif menelpon menyampaikan salam dan meminta video klip campursari yang mereka minati untuk diputar (Musik Indonesia yang mengacu pada campuran *genre* musik yang memodifikasi alat-alat musik modern dengan alat-alat musik tradisional seperti gamelan). Berikut cuplikan gambar acara tersebut:



GAMBAR 3

*Langen Swara*, Senin, 21 Juli 2014

*Jogja TV* terlihat “berbeda” dengan tayangan-tayangan acara TV nasional. Hal ini dikarenakan muatan lokal terasa mendominasi tayangan stasiun televisi ini. Meskipun demikian peneliti melihat tayangan-tayangan kebudayaan masih berkisar pada kemasan yang masih tradisional. Kenyataan inilah yang memperlihatkan bagaimana kebudayaan dimaknai oleh media lokal. Peneliti berasumsi media lokal *Jogja TV* ini akan kesulitan menjangkau para pemirsa muda.

Begitu pula pada surat kabar *Kedaulatan*

*Rakyat*. Terdapat artikel *Mekar Sari (Memeti Kebudayaan Jawi)* atau *Cerita Bersambung Api di Bukit Menoreh* terkandung berbagai muatan kebudayaan Jawa yang kental, yang penuh dengan nilai-nilai keberanian, kebaikan dan saling mengasihi antar sesama. Cerita silat milik penulis S.H. Mintardja ini menampilkan cerita tokoh utama Agung Sedayu. Cerita Jawa klasik ini juga berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sejarah dan berbagai ilmu yang lekat dengan budaya lokal (*local wisdom*) yaitu *Olah Kanuragan* (Kemampuan tenaga/kekuatan dalam manusia yang diperoleh dari pertapaan yang panjang dengan syarat yang berat seperti *mutih* yaitu hanya memakan nasi dan air putih dalam jangka waktu yang lama). Keseluruhan latar belakang cerita di kerajaan Majapahit dan para penerusnya. Kemudian cerita juga berkaitan dengan peristiwa dibentuknya kerajaan Mataram yang mengisahkan persoalan kekuasaan istana yang saling berkelindan dan menghadirkan tokoh-tokoh lainnya seperti laskar Arya Penangsang, Tohpati, Kian Mantahun sampai Maha Patih Djipang.

Pada hari berikutnya KR juga menampilkan berita mengenai acara diskusi *Sarasehan Budaya Spiritual DIY* bertema “*Ekspresi Kebudayaan Spiritual dalam Rangka Ketahanan Budaya Lokal*” seperti yang tampak dalam gambar di atas. Dalam berita tersebut dijelaskan nilai budaya Jawa harus dilestarikan namun ada pula kebudayaan yang perlu direvaluasi dan diinterpretasi karena berkaitan dengan konteks kehidupan sehari-hari kota dan masyarakat Yogyakarta yang telah berubah. Misalkan esensi dari nilai “*dadiyo banyu emoh nyawuk, dadiya godhong emoh nyuwek, ilang-ilangan endhog siji, sumangga kersa, istri kanca wingking serta jam karet*” yang dalam diskusi tersebut dijelaskan sebagai kearifan lokal yang perlu diubah makna dan penerapannya dalam masyarakat.

Melihat berbagai acara televisi dan artikel koran terlihat media lokal sepertinya berupaya menampilkan berbagai muatan kebudayaan Yogyakarta. Di sinilah sesungguhnya muatan *civic culture* telah disampaikan. Namun, cara



media yang lebih menarik. Gak bikin bosan. Itu kan cerita-cerita bagus soal sehari-hari, bijaksana, pemberani, jujur apik banget. Kalau KR ya bagus jadi media yang saya baca, meski gak tiap hari. Tapi rubriknya bisa lebih anak muda. Misal cerita-cerita bersambung isinya harus sesuai dengan konteks masa kini misal ya bicara korupsi, apa cinta dengan negara atau spesifik saat ini. Artikel silat menarik tapi kenapa kok gak dibuat visualnya, kan lebih bagus ya.”

Rustam: “Yak saya hampir sama kaya mas Iwan, ketika ada acara kerjasama dengan Jogja TV ya nonton. Karena kendalanya utamanya adalah saya sulit mencari Jogja TV karena bruwet. Pernah bagus tapi tidak bertahan lama. Itu kendala saya. Kalau baca berita yang berbau lokal, seperti info sepeda gembira, berita mengenai lurah di Bambanglipuro. Karena kadang-kadang berita yang berbau lokal ini, kalau ga dari KR saya gak dapet berita. Karena di online beritanya nasional. Selain itu dari iklan baris tadi saya juga butuh itu no satu se-Jogja, komplit informasi kebutuhan jasa dan barang. Dan berita dengan konteks lokal seperti pemilihan kepala desa, atau wisatawan di pantai selatan. Kadang itu satu sisi aku butuh tapi tidak ter-cover oleh berita nasional. Mungkin sederhana lingkungnya tapi itu menjadi sesuatu yang saya butuh ngerti. Jadi ketika keluarpun lebih untuk beli KR.”

Udin: “Nonton jarang, karena memang gak begitu suka TV ya. Malah kalau pas saya lihat banyak iklan obat alternatif, lah gimana ya itu kan iklan yang menghidupi TV lokal. Kalau di KR paling tujuan baca golek iklan, itu juga sekarang lebih cepat cari iklan di media online. Mungkin KR di Jogja dan Jateng itu masih wajib ya. Nek rung moco koran ki yo KR. Itu jaman dulu ya, tapi sekarang udah mulai bergeser. Banyak online itu otomatis referensi kita baca koran itu banyak jadi tertarik baca Kompas, Tribun dan lain-lain. Jadi kita lebih leluasa memilih. Jadi mindset kita udah gak KR lagi setelah ada online.”

Bona: “Kalau Jogja TV itu ada acara yang musik di siang sama pagi. Ada video klip apa saja,

saya seneng sih lihatnya. Karena video klip kan sama kaya kerjaan. Kalau musiknya karena saya kerjaan di EO jadi bisa lihat besok kalau butuh band saya bisa sudah tau setelah lihat di Jogja TV. Jadi ya sering juga gak malah pas aja kalau pas mencent remote dapat Jogja TV tapi gambar suka banyak semutnya suka terganggu menonton akhirnya, lagu-lagu liat tapi kalau gak ya ganti. Kalau KR jarang sekali bacanya.”

Wawan: “Kalau saya nonton KR jarang ya, di sekolah guru selalu bilang dulu kalau mau bacaan yang bagus ya Kompas jadi sejak SMA jarang baca KR. Kalau informasi lokal ya paling dapat dari Jogja TV, temenku juga ada yang jadi penyiamnya jadi kadang nonton.”

Imah: “Baca KR rubrik Opini paling suka, kemudian Surat Pembaca dan Panggung sih meski sekilas. Kalau baca KR kan lokal banget informasinya jadi selalu dapat berita tentang Jogja ya disitu. Kalau Jogja TV jarang nonton paling ya talk show soal perbincangan politik, sosial demokrasi, tapi lebih sering nonton TVRI Jogja lebih bagus.”

Sesuai pemaparan di atas dapat diketahui bahwa kaum muda pernah menonton dan membaca media lokal, namun semua informan menyatakan merasa media lokal kurang menampilkan bentuk visual yang atraktif. Seperti Iwan yang mengakui suka dengan cerita wayang namun bentuk penyajian masih kalah dengan serial Mahabarata yang sekarang sedang naik daun di stasiun TV nasional. Sehingga meski pesan-pesan yang disampaikan baik namun kemasan masih tertinggal dengan media nasional. Secara infrastruktur teknis ada dua informan yang merasa tayangan Jogja TV kurang bisa dinikmati karena kurang baik mutu gambar dan suaranya hal ini tentu saja membuat mereka terkendala dalam menonton Jogja TV.

Menurut peneliti, di sini lahirnya ketidakserasian pemaknaan kebudayaan yang dimaksud antara kaum muda dengan media lokal. Keterbatasan modal nyatanya juga

menghambat pengembangan mutu siaran yang akhirnya membuat tayangan lokal tidak dapat bersaing dengan tayangan nasional. Meskipun dilain pihak semua informan mengakui bahwa media lokal di Jogja telah memberikan informasi yang bersifat lokal dan informasi tersebut tidak dapat mereka peroleh dari media nasional.

Mengutip dari Geertz (1973) yang menyatakan kebudayaan adalah jaring-jaring makna yang dirajut oleh manusia, meskipun tidak seluruh manusia menentukan jaring-jaring tersebut, ada kalanya sekelompok orang sekadar menjadi *outsider*, atau penonton dari luar semata. Peneliti lihat hal inilah yang terjadi oleh kaum muda ketika memaknai kebudayaan versi media lokal, mereka merasa tidak menjadi bagian dan bahkan tidak merasa memilikinya. Karena kebudayaan lokal sebelumnya telah diberi makna oleh para pemilik modal dan penguasa yang sudah terlebih dahulu eksis. Tidak mengherankan apabila sejauh ini mereka merasa tidak terwakili dengan isi media lokal.

## KESUKARELAAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Demokrasi secara alamiah membentuk masyarakat sipil (*civil society*) yang didefinisikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, kemandirian tinggi terhadap negara dan keterikatan anggotanya terhadap nilai dan norma hukum (Hikam, 1998: 3). Masyarakat sipil akan terwujud dalam organisasi yang dibuat masyarakat di luar pengaruh negara seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi keagamaan, komunitas sosial dan kepentingan. Inilah yang tercermin di masyarakat Yogyakarta seperti yang disampaikan oleh salah satu informan bahwa mereka merasa menjadi bagian kuat dari Jogja yang Istimewa karena budaya toleransi dan kesukarelaan sosial yang tinggi melekat pada kehidupan sehari-hari:

Udin: *"Kalau dulu saya PMI, jelas terlibat. Tapi waktu gempa itu saya sudah banyak*

*liputannya karena sedang bekerja, dari situ tau daerah mana yang belum terjangkau dan menginformasikannya, karena masih kerja di media lokal sih tapi ya itu merasa berguna pekerjaan saya untuk orang lain."*

Iwan: *"Untuk kebencanaan bergabung dalam gerakan muda-mudi. Untuk sosial, bergerak dengan kawan-kawan mengadvokasi teman-teman di Janti pasca meletusnya kasus cebongan, bagaimana membentengi wilayah tersebut supaya tidak terjadi pengulangan kekerasan."*

Rustam: *"Waktu dulu gempa bekerja sama dengan teman-teman komunitas suporter seluruh Indonesia, mereka menyalurkan, kita yang di lapangan. Kebetulan dalam waktu dekat akan memberikan pendidikan dalam membangun online shop. Dengan wordpress bekerjasama kemudian memberikan pelatihan pada kelurahan-kelurahan dimana ketika ada potensi di dalamnya supaya mereka bisa menggerakkan melalui website juga. Dananya dari bantuan langsung teman-teman dan CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan."*

Bona: *"2006 ketika gempa itu saya volunteer di Bantul, kemudian saat Merapi meletus saya empat bulan di Srembung, sebelah barat Merapi. Kami ingin membantu karena disana belum terkena, tapi akhirnya juga terkena, ya Alhamdulillah kita bermanfaat di sana. Juga volunteer di Kelud, saya gak suka ada bencana, tapi ketika ada bencana saya ingin berguna supaya tetap membantu seperti sebuah pengabdian. Biasanya dari kampus dan komunitas kerja saya yang anak-anak muda."*

Wawan: *"Pas SMA lebih ke ikatan, ketika merapi 2010, saya ikut di sekolah Pangudi Luhur di 17km dari puncak Merapi bersama teman-teman sekolah Katolik lainnya. Guru selalu menekankan kita harus bantu sekecil apapun, banyak yang membutuhkan pertolongan kita."*

Imah: *"Selalu ikut kalau ada bencana apapun di Jogja, biasanya karena respon berita juga yang aku baca di KR atau di koran lokal."*

Buka pos tanggap darurat atau ya ikut pos teman bisa menampung dan menyalurkan bantuan, pasti terlibat karena isu saya juga disekitar perempuan, sosial, politik jadi selalu berhubungan.”

Kota Yogyakarta memiliki sejarah yang memang istimewa dibandingkan dengan daerah atau kota-kota lain di Indonesia. Tahun 1950-an kota ini diberikan status dengan administrasi Istimewa oleh pemerintah Indonesia karena berbagai alasan. *Pertama*, Yogyakarta memiliki sejarah kota yang ikut dalam proses pendirian Negara Republik Indonesia, karena di tahun HB IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945. Isi dekrit tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekrit dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh Sri Paduka PA VIII pada hari yang sama. Secara politik kemudian Yogyakarta dipersilahkan untuk tetap menjunjung tinggi kehadiran Raja yang juga disebut dengan Sultan yang kemudian memiliki otoritas seumur hidup untuk menjadi Gubernur DIY. Tampuk kekuasaan ini kemudian juga dapat diturunkan kepada keturunan Sultan berikutnya. Inilah yang menyebabkan Yogyakarta disebut dengan Daerah yang Istimewa karena memiliki tata cara pemilihan kepala daerah yang berbeda dengan propinsi lainnya di Indonesia.

*Kedua*, masyarakat Yogyakarta terkenal dengan pemikirannya yang modern, terbuka dengan nilai-nilai baru, toleran, pluralis sekaligus menjunjung tinggi kebudayaan mereka. Situasi masyarakat Yogyakarta juga terbilang menarik karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kota ini memiliki penduduk yang masih lekat dengan kebudayaan lokal meskipun juga telah banyak kedatangan para perantau mahasiswa yang kemudian bekerja dan menetap di Yogyakarta. Kebudayaan lokal yang melekat erat sampai saat ini adalah budaya kesukarelaan, hal ini yang tergambar jelas dalam setiap penuturan para informan. Dorongan dan pelajaran

kesukarelaan mereka dapatkan dari institusi pendidikan seperti yang dipaparkan Wawan, kemudian ada juga yang mengatakan kegiatan kesukarelaan adalah kesempatan “mengabdikan” untuk masyarakat ini adalah bentuk panggilan hati sebagai warga Jogja.

Peneliti juga menanyakan keterkaitan antara lingkungan sosial Yogyakarta dengan dorongan kesukarelaan mereka. Karena hal ini juga berpengaruh pada sikap kesukarelaan masyarakat ketika merasa menjadi bagian lingkungan yang demokratis:

Iwan: “*Demokratis’e kadang-kadang tidak dibarengi dengan kesadaran hukum yang kuat. Misale ya oke ada boleh kelompok ini, kelompok ini, demokratis kan? Tapi ketika mereka melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hukum, ya sudah dibiarkan saja. Demokratis juga toh? Tapi ketika misal konco kampung ketika rame ro FPI ya wes, luwih becik ngalah wae. Kembali saiki demokrasi sing koyo opo. Saya merasa harus lebih serius.*”

Wawan: “*Mungkin agak sedikit berbeda, saya melihat angkatan saya, gak cuma di universitas saya tapi secara general. Teman-teman sedikit sekali yang berani bersuara, yang pertama mungkin takut, yang kedua buat apa to? Golek aman juga. Ketika nanti melawan arus kita hanya dianggap aneh oleh teman-teman. Mungkin gambaran untuk generasi setelah ini.*”

Rustam: “*Demokrasi cukup demokratis. Tapi kadang-kadang terlalu demokratis. Dalam artian bagus masyarakat Jogja ini tingkat permaklumannya tinggi, ketika melanggar peraturan, ya wajar cah enom. Ketika ada suatu dalam budaya pelaporan pelayanan publik, ada lembaga Ombudsman tapi ya sedikit sekali yang mau. Ketika merasa, ini kok pelayanannya buruk ya? Ah yo wes memang seperti itu. Memang tidak ada itikad dari diri sendiri biar ini tambah apik, tak laporke yang bersangkutan. Ya itu tadi karena itu demokratis kok, haknya dia. Dalam satu sisi itu menjadi pemakluman yang tidak baik, tidak pada tempatnya.*”

Bona: “Ya saya inginnya pembangunan kota

lebih untuk masyarakat banyak tidak hanya untuk kelas menengah seperti café, hotel yang lebih mendominasi pembangunan kota Yogya sekarang ini. Pngen Yogya modern tapi pemikiran dan aktivitas bukan bangunannya saja. Jadi orang bisa ke angkringan tapi juga kuliah dikampus modern dan maju.”

Imah: “Demokratis iya, kadang enggak. Tentatif, kaya kasus Florence kemaren malah sangat tidak demokratis. Salah dia karena sembarangan berkomentar tapi kok siapa sih yang kemudian muncul, siapa yang merespon, kebetulan juga teman-teman seangkatanku. Sayang juga kenapa pakai dilaporkan, dia di bully di sosmed saja sudah cukup bikin malu sebenarnya. Iya sih menurutku, karena kemudian ketika kalau kita sandingkan banyak sekali kasus, kasus yang melecehkan. Tapi ya gak ada tindakan.”

Udin: “Pengennya ya semua bisa diutamakan untuk rakyat, pembangunan perlu tapi yang untuk rakyat jangan lupa. Jangan hotel saja, ingin lebih ada gregetnya soal Istimewanya Jogja. Ingin ada tempat untuk anak muda, anak-anak karena memang Jogja itu Istimewa pinter-pinter, terbuka dan toleransi harus diupayakan terus menerus.”

Kemudian peneliti menanyakan “Apa yang anda pahami mengenai Keistimewaan Yogyakarta?” Para informan hampir semua menjawab bahwa Keistimewaan adalah persoalan hidup bersama-sama dengan keberagaman meskipun mereka juga mengharapkan ada gerakan yang lebih spesifik yang dapat dilakukan pemerintah DIY untuk meningkatkan situasi dan kondisi kota Yogyakarta yang semakin padat dan “berwajah” metropolis, seperti penuturan mereka berikut ini:

Rustam: “Saya mau menanggapi tentang kehilangan jati diri, menurut saya gak cuma di Jogja, di Indonesia-pun sedang mengalami krisis seperti itu. Mungkin ketika Flo melakukan seperti itu, banyak di tempat lain yang melakukan serupa. Ketika yang menanggapi berlebihan, di Bandung juga ada kan misuhi Ridwan Kamil. Nah memang

betul kadang menunjukkan jati diri orang secara terpendam mengekspresikannya ya mencerminkan mereka. Saya mengambil contoh di komunitas bola gelut dewe-dewe. Tapi ketika sekolah mereka bareng-bareng, tapi ketika membawa tim masing-masing mereka bisa berantem. Saya pikir hal-hal begini umum, dimana-mana terjadi seperti itu. Berkaitan dengan pendidikan karakter berkaitan dengan keistimewaan, ada satu sisi yang perlu di perdalam lagi ketika muatan lokal dengan seni tari, bahasa jawa, mungkin muatan lokal yang lebih mendalam secara unguah-ungguh lebih ditekankan. Keistimewaan juga menyangkut hal-hal seperti itu dan berpengaruh kaitannya dengan keistimewaan itu. Iya, bukan hanya tari dan lain-lain, bukan kayak di Kulon Progo itu pencegahan malaria tapi pakai tanggap wayang. Tapi lebih sesuai lagi dengan caranya. Yang perlu lebih di perdalam di pendidikan keistimewaan, seperti unggah-ungguh, tepa selira.”

Udin: “Jogja Istimewa, karena Jogja itu jabang bayi Indonesia, karena daerah yang berdaulat cuma Jogjakarta tahun 1948. Seandainya Sultan tidak bergabung ke Indonesia, ya Indonesia gak akan ada, awal keistimewaan kan dari situ. Dalam kartu pegawainya HB IX itu nomor 0001, diangkat tahun 1940, dari dulu sudah diakui dia yang melahirkan Indonesia. Sekarang keistimewaan harus dipandang lebih luas, tidak menjadi slogan saja. Bagaimana masyarakat bisa jadi istimewa dengan tepo seliro, toto kromonya yang di masukkan kependidikan sejak dini sangat wajib penting sekali, jadi kita tidak kehilangan kebudayaan dan mencetak generasi-generasi yang berbudaya. Setelah tercapai ada lagi setelah menjadikan diri istimewa, berarti membuat daerah lain istimewa juga. Kita harus berkontribusi menjadikan daerah lain istimewa. Dengan syarat kita istimewa terlebih dahulu.”

Bona: “Istimewa sih.... Saya gak tau ya 20-30 tahun kedepan keistimewaan kita kaya apa. Entah dengan banyak hotel jadi istimewa apa piye, ingin Jogja tetap maju sebagai kota modern tapi ya itu soal kebudayaan jangan lupa selalu didengarkan soal unguah-ungguh, mau memahami orang lain juga penting..”

Wawan: *“Istimewa itu di beri contoh. Bukan teori, keistimewaan itu ketika ada suatu figur yang memberi contoh istimewa tidak bisa diteorikan tapi di berikan contoh. Action yang nyata. Sekarang ya pudar, misal dari guru dan dosen itu tidak lebih istimewa daripada orang tua. Orang tua saya yang mengajarkan seperti orang istimewa atau Jawa. Kalau politikus sekarang yang di Jakarta jadinya malah bukan panutan, tapi rebutan sendiri-sendiri.”*

Imah: *“Ya aku orang yang masuk dalam pro keistimewaan dalam konteks perlu di jaga konteks kesejarahan. Jadi jangan hanya berhenti sebatas jargon itu yang bermasalah. Pengakuan keistimewaan itu di berikan konteksnya, istilahnya pencapaian politik kalau misalnya punya implikasi ke kebijakan pengelolaan daerah, aku kira itu akan sangat jadi istimewa betul. Ketika Jogja diberi satu keuntungan menjadi istimewa tapi tidak di barengi dengan bagaimana mewujudkan keistimewaan, ya wes gak ada itu namanya keistimewaan. Karena kalau kita ngomong membandingkan dengan daerah lain, misal kalau kebijakan mengatur kotanya belum kelihatan istimewanya. Belum bisa menjadi contoh. Soal proteksi juga, semacam dibiarkan gitu saja, kita kan punya banyakan kekayaan, kaya ritual kebiasaan kungkum, ritual tradisi lainnya, sekarang banyak sekali yang mendominasi karena merasa lebih benar dan mayoritas. Nah itu yang menurutku misal kalau mau menurunkan indikator keistimewaan itu harusnya ada.”*

Pembangunan kota Yogya saat ini, bagi semua informan sangat bermasalah. Pembangunan hotel yang masif bukan pilihan yang baik apabila ingin membedakan DIY dengan kota-kota yang lain. Di lain pihak mereka sesungguhnya peduli dan ingin menjadi bagian dari kota ini karena mengakui masyarakatnya yang memerlukan tempat yang aman dan nyaman ketika berinteraksi satu sama lain. Di sinilah salah satu partisipasi politik kaum muda, mereka mengakui ke-Istimewaan kota Yogya namun juga mengkritisi kebijakan pemerintahannya yang seakan pembangunan kota hanya untuk turis yang ingin “menikmati” Jogja.

Kaum muda juga mengaku sudah melakukan beberapa kali aksi untuk membicarakan fenomena “banjir” hotel di Yogyakarta. Baik dalam diskusi akademis, gerakan masyarakat peduli Jogja melalui komunitas-komunitas maupun dalam konteks pembicaraan media sosial. Dalam wadah masyarakat sipil itulah partisipasi politik dapat dijalankan. Idealnya negara berfungsi menjadi sentral yang mengatur pasang surut kehidupan masyarakat sipil. Pemerintahan demokratis meningkatkan kekuatannya dengan cara mempertahankan keteraturan masyarakat. Maka semakin tua komunitas demokratis maka semakin terpusatlah pemerintahan (Tocqueville, 2005: 382).

Seperti yang disampaikan oleh enam kaum muda di atas bahwa kehidupan masyarakat sipil di Jogja seharusnya dapat menjadi refleksi pemerintahan DIY dalam mengelola kepentingan antara “kearifan lokal” dengan “pasar”. Posisi kritis disampaikan para kaum muda dalam melihat perkembangan kota ini dari waktu ke waktu. Merujuk Feathersone (dalam Abdullah 2006:184), “Kehadiran kaum muda dengan nilai-nilai yang bervariasi sesungguhnya merupakan agen perubahan yang karena sikap permisif yang dimiliki dan juga karena potensi untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan primordial yang dienkulturasikan dan disosialisasikan dalam berbagai wacana sosial”. Kenyataan ini dapat merujuk pada kaum muda tidak lagi sebagai entitas pasif terhadap nilai-nilai yang sosialisasikan oleh generasi tua dalam suatu lingkungan (seting) sosial, tetapi mereka mulai ikut mengendalikan nilai dan menegosiasikan praktik-praktik sosial (Griffin, 1993 dalam Abdullah 2006:184-185). Untuk itu, konteks proses sosial yang begitu bervariasi seperti media lokal juga perlu berbenah diri dalam mengemas kebudayaan yang seharusnya dapat pula dinikmati dan diterima kaum muda sebagai bagian dari kebudayaan.

Lebih lanjut Tocqueville menjelaskan bahwa pada masyarakat yang telah terbiasa menikmati kebebasan maka pemusatan

pemerintahan yang dikuasai oleh elit akan meningkatkan kesetaraan antara pemimpin dengan pengikutnya sehingga para penguasa meskipun hak khususnya meningkat namun independensinya tidak hilang. Hal sebaliknya terjadi pada masyarakat yang baru saja menikmati kebebasan, euforia kebebasan akan menciptakan elit politik baru yang tidak independen sehingga kestabilan demokrasi sulit tercipta (Tocqueville, 2005: 383). Berdasarkan penjelasan di atas, partisipasi politik masyarakat menjadi terang benderang. Jika selama ini partisipasi politik hanya diidentikan dengan keikutsertaan dalam Pemilihan Umum, menjadi pengurus atau partisipan partai dan berperan aktif dalam pengaturan kekuasaan pemerintahan adalah pemahaman yang sempit dan terlalu simplistik.

Partisipasi masyarakat di bidang politik seharusnya diarahkan untuk mengaktifkan dirinya dalam pembentukan dan aktivitas gerakan masyarakat sipil. Pemerintah menjamin kebebasan masyarakat sipil dengan memosisikan mereka setara di depan hukum. Warga negara dapat mempelajari dan mengimplementasikan etika politik dan kemudian membawa *habitus* tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika masyarakat telah terbiasa berorganisasi, menyuarakan hak dan pendapatnya, belajar bekerjasama dengan berbagai pihak yang berbeda kepentingan maka pemusatan pemerintahan dalam demokrasi tidak akan menciptakan kesewenang-wenangan namun kesetaraan antara pengikut dan pemimpin. Para pemegang kuasa (pemimpin) memiliki independensi untuk memilah kepentingan pribadi dan negara.

Yogyakarta memiliki masyarakat tradisional yang maju dan modern, juga memiliki sikap kritis karena memiliki universitas negeri tertua di Indonesia sekaligus berdiri berbagai universitas swasta yang memiliki mahasiswa yang datang dari seluruh penjuru daerah Indonesia. Hal ini terbukti dengan hasil diskusi kelompok terfokus yang telah peneliti lakukan ditemukan

bahwa keenam informan menyatakan bahwa mereka sangat senang menjadi bagian kota Yogyakarta. Kemudian mereka juga merasa menjadi bagian dari masyarakat kota Yogyakarta yang harus dapat menyesuaikan dengan kebudayaannya yang menjunjung toleransi dan segala perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain mereka juga mengkritisi situasi Yogyakarta yang padat dan penuh dengan kehadiran hotel-hotel di tengah kota. Kaum muda menginginkan kota Yogyakarta dapat dikelola dengan lebih baik lagi dengan, pembangunan kota semestinya mempertimbangkan keseimbangan antara perkembangan modern dan kearifan lokal, tidak berorientasi fisik semata.

## SIMPULAN

Pembangunan Kota Yogyakarta perlu dikelola secara bersama-sama, dengan status Istimewanya, maka perlu kebijakan yang berbeda dengan kota-kota yang lain. Namun dalam bentuk-bentuk yang tidak sama lagi seperti dulu, kurangnya kedekatan pemimpin dengan masyarakat, keterikatan ruang kota yang semakin kosmopolit (*café*, *mall*, *hotel*) mengubah jarak dan adanya perubahan pemaknaan mengenai kebudayaan. Kebudayaan bagi kaum muda menjadi bagian yang sehari-hari yang lebih terjangkau oleh kehidupan mereka seperti berkendara lebih nyaman, jaminan dapat mengartikulasikan pendapat yang lebih baik dari sebelumnya dan bebas berekspresi dalam ruang kota yang aman dan nyaman.

Kehadiran media lokal telah memberi ruang nyata pada kebudayaan DIY dalam menampilkan wawasan kearifan lokal. Namun, tayangan media lokal belum menyentuh pada hal-hal mendasar kebudayaan yang kaum muda pahami saat ini, yaitu media sebagai perekat perbedaan dalam masyarakat Yogyakarta yang multikultur. Tayangan-tayangan media lokal masih berkatat pada kemasan kebudayaan yang ketinggalan zaman dan kurang "berbicara" pada konteks kekinian; seperti kenyataan toleransi beragama mulai terdegradasi, lemahnya

tenggang rasa di jalan raya, sampai melunturnya kesadaran bersama menjadi warga Yogyakarta yang hidup dalam wilayah kota yang semakin modern dan kosmopolit.

Makna kebudayaan terbentuk karena bagian dari *status quo* dalam sebuah masyarakat, tidak lain adalah generasi sebelumnya yang lebih dahulu eksis dan mendominasi tatanan sosial, politik, hukum, agama dan pemerintahan. Dalam kecenderungannya media lokal relatif memaknai dan memberi wadah terhadap pemaknaan kebudayaan dari kaum tua. Batas-batas budaya lahir akibat kaum muda yang cenderung dimarginalkan akibat proses dan praktik pemaknaan kebudayaan yang tidak melibatkan mereka. Dalam hal ini kaum muda tidak hanya dapat “didekati” dan “dipahami” sebagai sasaran nilai namun mereka adalah pembentuk nilai-nilai yang baru. Mereka adalah aktor yang mewarnai dan mendefinisikan kebudayaan dalam ruang kota yang plural sekaligus multikultural seperti Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Almond, Gabriel dan Verba, Sidney. 1965 [1963]. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Boston: Little, Brown and Company.
- Burton, Graeme. 2000. *Membicarakan Televisi: Sebuah Pengantar dalam Kajian Televisi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Chamim, Asyukuri ibn, ed. 2003. *Pendidikan Kewarganegaran: Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Bekeadaban*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Croteau, David & William Hoynes. 2000. *Media/Society, 2<sup>nd</sup> ed.* London: Pine Forge Press.
- Darwanto. 2007. *Televisi Sebagai Media Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Devereux, Eoin. 2003. *Understanding the Media*. London: Sage.
- Durham, Meenaskhi G, and Kellner, Douglas M (ed.).

2006. *Media and Cultural Studies, revised edition*. United Kingdom: Blackweel Publishing Ltd.
- Ewen, Stuart. 1976. *Captains of Consciousness: Advertising and The Social Roots of the Consumer Culture*. New York: McGraw-Hill.
- Fiske, John. 1991. *Television Culture, Second Edition*. New York: Routledge.
- Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. 1963. *Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. New Jersey: Princeton University Pres.
- Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. *The Civic Culture Revisited: an Analitic Study*. 1980. Boston: Little Brown.
- Geertz, Clifford. 1973. *Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Hefner, Robert W, ed. 2001. *The Politics( of Multiculturalism. Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*. USA: University of Hawai'i Press All.
- Hikam, Muhammad AS.1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Miles, Matthew B. dan Michael B. Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis : A Source of New Methods*. London: Sage Publications.
- Rod, Hague dan Martin Harrop. 2004. *Comparative Government and Politics; an Introduction, Sixth Edition*. New York: Palgrave Macmillan.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 1990. Jakarta: Rajawali Press.
- Tocqueville, Alexis De. 2005. *Tentang Revolusi, Demokrasi dan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

### KORAN:

- Kedaulatan Rakyat*, Edisi Sabtu, 5 Juli 2014 “Api di Bukit Menoreh”
- Kedaulatan Rakyat*, Edisi Minggu, 6 Juli 2014 “Tepa Selira Karakteristik Kebudayaan Jawa”

### TAYANGAN TELEVISI:

- Jogja TV, Edisi Senin*, 21 Juli 2014 *Langen Swara*
- Jogja TV, Edisi Selasa*, 22 Juli 2014 *Seputar Jogja*
- Jogja TV, Edisi Minggu*, 20 Juli 2014 *Wayang Wong*

### WEBSITE:

[www.krjogja.com](http://www.krjogja.com)

<http://www.jogjatv.tv/about-s#sthash.OGnjXQX.dpuf>